



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TENAGA KERJA DAN INFLASI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

LENNI HARYANI DONGORAN
NIM. 13 230 0025

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TENAGA KERJA DAN INFLASI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

LENNI HARYANI DONGORAN
NIM. 13 230 0025

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 2009011 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Lenni Haryani Dongoran**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 07 Juni 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Lenni Haryani Dongoran** yang berjudul **"Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP: 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenni Haryani Dongoran

NIM : 13 230 0025

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.**

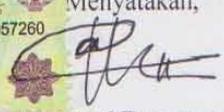
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Mei 2017



Menyatakan,


Lenni Haryani Dongoran
NIM. 13 230 0025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenni Haryani Dongoran
NIM : 13 230 0025
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENGARUH IPM, TENAGA KERJA DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

tanggal : 17 Mei 2017

menyatakan,

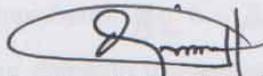


Lenni Haryani Dongoran

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : LENNI HARYANI DONGORAN
NIM : 13 230 0025
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), TENAGA KERJA DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015.

Ketua



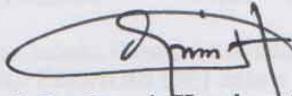
Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

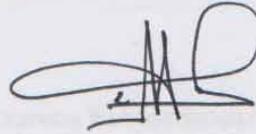


Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota



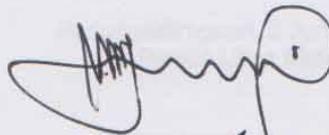
1. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



2. Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP.19800605 201101 1 003



3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



4. Mudzakkir Khofib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 02 Juni 2017
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,57



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
TENAGA KERJA DAN INFLASI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

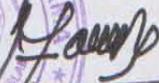
NAMA : LENNI HARYANI DONGORAN
NIM : 13 230 0025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 9 Juni 2017

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : LENNI HARYANI DONGORAN

NIM : 12 230 0025

Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 1986-2015 mengalami fluktuasi akan tetapi IPM dan tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan. Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara belum stabil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh IPM, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015.

Menurut Robert M. Solow pertumbuhan output bersumber dari kenaikan dan kualitas tenaga kerja. Pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja diukur dengan Indeks pembangunan Manusia (IPM). Menurut Lewis kenaikan inflasi dalam jangka panjang akan berakibat buruk pada perekonomian suatu negara, artinya produksi barang konsumen gagal meningkat secara cepat.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 1986-2015. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Hasil dari estimasi menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0,9311 > 0,05$, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0,3727 > 0,05$, inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0,0000 < 0,05$. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa IPM, tenaga kerja dan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0,000000 < 0,05$. Nilai R^2 sebesar $0,754894$, yang berarti bahwa IPM, tenaga kerja dan inflasi mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 75,48 persen. Sedangkan, sisanya sebesar 24,52 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : IPM, Tenaga Kerja, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan menyusun skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan contoh suri teladan kepada seluruh umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *yawmil mahsyar* kelak.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015”**, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam jurusan Ekonomi Syariah konsentrasi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti sangat banyak mengalami kendala yang disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat kerja keras, bantuan dan bimbingan serta doa dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, menghantarkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,

dan Bapak Drs. Syamsuddin Pulungan, M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, SH.I., MSi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus Pembimbing I, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Sekretaris Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nurul Izzah, M.Si sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa orangtua peneliti yaitu Ayahanda Hasan Dongoran dan Ibunda Nursoni Harahap tercinta yang telah mengasuh dan membimbing, serta mendidik peneliti semenjak dilahirkan hingga sampai sekarang, beliau berdua merupakan motivator peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada keluarga besar kakanda dan adikku tersayang; Hendra Setiawan Dongoran, S.Pt, Muhammad Rifai Dongoran, Hamdan Syahbani Dongoran yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada peneliti.
8. Sahabat-sahabat saya Kasmira, Afifah, Amelia, Maysarah, Sri Wahyuni, Anggun, Nuramaliyah, yang selalu memberi semangat dan telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-teman terdekatku seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah dalam konsentrasi bidang Ilmu Ekonomi (ES-1.IE) angkatan 2013. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian sampaikan kepada peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2017
Peneliti

Lenni Haryani Dongoran
13 230 0025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥ ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍ ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥ ah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fatḥ ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Definisi Operasional Variabel	15
F. Tujuan Penelitian	17
G. Manfaat Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kerangka Teori	19
1. Pertumbuhan Ekonomi	19
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	19
b. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi	21
c. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi	23
d. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam	30
2. Indeks Pembangunan Manusia	31
a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	31
b. Komponen-komponen IPM	33
c. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam	33
3. Tenaga Kerja.....	37
a. Pengertian Tenaga Kerja.....	37
b. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam	38
c. Kontrak Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam	40

4. Inflasi	41
a. Pengertian Inflasi	41
b. Jenis-jenis Inflasi	43
c. Teori-teori Inflasi.....	46
d. Cara Mengatasi Inflasi.....	47
e. Inflasi dalam Perspektif Islam	48
B. Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Pikir.....	54
D. Hipotesis	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 57

Metodologi Penelitian	57
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
2. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	57
3. Populasi dan Sampel.....	58
a. Populasi	58
b. Sampel.....	58
4. Teknik Analisis Data	59
a. Regresi Linear Berganda.....	59
b. Uji Asumsi Klasik	60
1) Uji Normalitas	60
2) Uji Multikolinearitas	61
3) Uji Heterokedastisitas.....	61
4) Uji Autokorelasi	62
c. Uji Hipotesis.....	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 64

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Kondisi Geografis Sumatera Utara	64
2. Kondisi Demografi Sumatera Utara	65
3. PDRB Sumatera Utara	66
B. Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	68
1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.....	68
2. IPM di Provinsi Sumatera Utara.....	71
3. Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara	75
4. Inflasi di Sumatera Utara	78
C. Hasil Estimasi	83
1. Hasil Regresi Linear Berganda.....	83
2. Uji Asumsi Klasik	85
a. Uji Normalitas	85

b. Uji Multikolinearitas.....	86
c. Uji Heterokedastisitas.....	87
d. Uji Autokorelasi	88
3. Uji Hipotesis	89
D. Pembahasan	92
E. Keterbatasan Peneliti	99
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%).....	3
Tabel 1.2	Klasifikasi Status IPM	5
Tabel 1.3	IPM di Indonesia Tahun 2015	6
Tabel 1.4	IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	7
Tabel 1.5	Pertumbuhan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	10
Tabel 1.6	Laju Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	12
Tabel 1.7	Definisi Operasional Variabel	16
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	51
Tabel 2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	53
Tabel 4.1	PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	67
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%).....	69
Tabel 4.3	Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	72
Tabel 4.4	Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	76
Tabel 4.5	Laju Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	79
Tabel 4.6	Hasil Analisis Linear Berganda	83
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas	86
Tabel 4.8	Hasil Uji Heterokedastisitas	88
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi	88
Tabel 4.10	Hasil Uji t-test	89
Tabel 4.11.	Hasil Uji F	91
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	54
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	71
Gambar 4.2 Pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	74
Gambar 4.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	78
Gambar 4.4 Laju Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)	82
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Jarque Bera (JB)	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Data Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tenaga Kerja dan Inflasi
- Lampiran 2 Hasil Analisis Linear Berganda
- Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja atau kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Kemampuan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.¹

Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan individu atau masyarakat, sehingga tidak akan terdapat perbedaan atas target ekonomi yang ingin diraih oleh negara-negara maju dan berkembang. Namun, realitanya tidaklah demikian. Negara-negara maju berkonsentrasi untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi di negara berkembang hanya berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan atau usaha untuk mengejar keterbelakangan dan pertumbuhan.²

¹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 9.

²Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 137.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan perekonomian Indonesia menggambarkan kinerja yang cukup mengembirakan selama periode tahun 2000-2008, dengan pencapaian perekonomian yang cukup membaik. Bahkan sejak tahun 2004, ekonomi Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang cukup berarti yaitu sebesar 5 persen, dan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 5,7 persen. Dua tahun berikutnya, pada tahun 2006 dan 2007, pertumbuhan ekonomi berturut-turut mencapai 5,5 persen dan 6,3 persen.³

Perekonomian Indonesia tidak bisa terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di perekonomian global, baik secara positif maupun negatif. Meskipun berada dalam berbagai tekanan dari sisi eksternal seperti tingginya harga minyak bumi dan harga beberapa komoditi dunia lainnya, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2008 Indonesia sangat merasakan fluktuasi perekonomian Indonesia yang sangat cepat bahkan dalam jangka waktu yang tidak lama telah terjadi perubahan yang cukup berarti dari satu titik ekstrem berikutnya.⁴

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -10,9 persen sampai 2,6 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

³Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, *Indonesia Ekonomi Outlook 2010* (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm. 4.

⁴*Ibid*, hlm. 5.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	1986	6,3
2	1987	8,7
3	1988	11,2
4	1989	-9,6
5	1990	-6,3
6	1991	7,6
7	1992	-7,4
8	1993	-6,4
9	1994	6,5
10	1995	9,3
11	1996	-8,8
12	1997	-8,2
13	1998	-10,9
14	1999	2,6
15	2000	4,8
16	2001	-3,7
17	2002	4
18	2003	4,5
19	2004	5,7
20	2005	-5,5
21	2006	6,2
22	2007	6,9
23	2008	-6,4
24	2009	-5
25	2010	6,4
26	2011	6,7
27	2012	-6,2
28	2013	-6,1
29	2014	-5,2
30	2015	-5,1

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1986-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1986-1988 mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut dari 6,3 persen mencapai

11,2 persen, kemudian turun pada tahun 1989 dan 1990 menjadi 9,6 persen dan 6,3 persen. Pada tahun 1991 naik sebesar 7,6 persen dan pada tahun 1992 sampai 1993 turun sebesar 7,4 persen dan 6,4 persen. Selanjutnya, pada tahun 1994 sampai 1995 kembali naik menjadi 6,5 persen dan 9,3 persen. Pada tahun 1996 sampai 1998 kembali turun secara berurut-turut sebesar 8,8 persen, 8,2 persen dan 10,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara drastis menurun terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 10,9 persen. Pasca krisis ekonomi, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara mulai membaik pada tahun 1999 sampai 2000 sebesar 2,6 persen dan 4,8 persen. Pada tahun 2001 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,7 persen. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2004 mengalami peningkatan sebesar 4 persen, 4,5 persen dan 5,7 persen dan pada tahun 2005 menurun sebesar 5,5 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara kembali meningkat pada tahun 2006 sampai 2007 sebesar 6,2 persen dan 6,9 persen dan menurun pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 6,4 persen dan 5 persen. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 naik sebesar 6,4 persen dan 6,7 persen. Pada tahun 2012 sampai 2015 mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,1 persen, 5,2 persen dan 5,1 persen.

Pembangunan ekonomi sekarang ini sangat menuntut adanya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga keberadaan pengetahuan dan keterampilan

tenaga kerja benar-benar diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Faisal Bahri dalam bukunya, salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia disuatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pada dasarnya IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, berkembang dan terbelakang. Semakin tinggi IPM nya, dan semakin baik hasil yang dibuahkan pembangunan manusia yang ada di negara bersangkutan. Secara implisit, IPM menegaskan adanya hubungan yang sangat kuat dan langsung antara kondisi pendidikan dan kesehatan di satu pihak, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di pihak lain.⁵

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok yang kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Klasifikasi status pembangunan manusia dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.⁶

Tabel 1.2
Klasifikasi Status Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status IPM
<60	Rendah
60<IPM<70	Sedang
70<IPM<80	Tinggi
>80	Sangat Tinggi

Sumber: Publikasi BPS Indeks Pembangunan Manusia

⁵Faisal Bahri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 88.

⁶Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, hlm. 29.

Indeks pembangunan manusia Sumatera Utara mencapai 69,51 persen pada tahun 2015. Dengan capaian IPM itu Sumatera Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”. Tidak hanya itu, capaian ini sekaligus mengantarkan Sumatera Utara pada posisi ke 10 dari 34 provinsi dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2015

No	Provinsi	IPM	Status IPM
1	DKI Jakarta	78,99	Tinggi
2	DI Yogyakarta	77,59	Tinggi
3	Kalimantan Timur	74,17	Tinggi
4	Kepulauan Riau	73,75	Tinggi
5	Bali	73,27	Tinggi
6	Riau	70,84	Tinggi
7	Sulawesi Utara	70,39	Tinggi
8	Banten	70,27	Tinggi
9	Sumatera Barat	69,98	Sedang
10	Sumatera Utara	69,51	Sedang
11	Jawa Barat	69,52	Sedang
12	Jawa Tengah	69,49	Sedang
13	Aceh	69,45	Sedang
14	Sulawesi Selatan	69,15	Sedang
15	Kepulauan Bangka Belitung	69,05	Sedang
16	Jawa Timur	68,95	Sedang
17	Jambi	68,89	Sedang
18	Kalimantan Utara	68,76	Sedang
19	Sulawesi Tenggara	68,75	Sedang
20	Bengkulu	68,59	Sedang
21	Kalimantan Tengah	68,53	Sedang
22	Kalimantan Selatan	68,38	Sedang
23	Sumatera Selatan	67,46	Sedang
24	Maluku	67,05	Sedang
25	Lampung	66,95	Sedang

26	Sulawesi Tengah	66,76	Sedang
27	Maluku Utara	65,91	Sedang
28	Gorontalo	65,86	Sedang
29	Kalimantan Barat	65,59	Sedang
30	Nusa Tenggara Barat	65,19	Sedang
31	Sulawesi Barat	62,96	Sedang
32	Nusa Tenggara Timur	62,67	Sedang
33	Papua Barat	61,73	Sedang
34	Papua	57,25	Rendah

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat IPM tertinggi di pulau Sumatera yaitu Kepulauan Riau, status pembangunan manusia provinsi pemekaran Riau tersebut telah masuk pada kategori “tinggi”. Provinsi Riau juga telah masuk pada kategori “tinggi”. Sementara itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, bersama dengan Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung berada pada posisi “sedang”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami penurunan di provinsi Sumatera Utara terkhusus beberapa tahun belakangan ini, terjadi karena beberapa faktor seperti banyaknya terjadi bencana alam, kerusakan dan peningkatan kriminalitas. Saat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, IPM di Sumatera mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perkembangan IPM Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4
IPM Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
1	1986	58,1	3,9
2	1987	62,5	7,6
3	1988	62,6	0,2
4	1989	63,8	1,9
5	1990	67,9	6,4

6	1991	68,1	0,3
7	1992	68,7	0,9
8	1993	70,3	2,3
9	1994	69,2	-1,6
10	1995	70,1	1,3
11	1996	70,5	0,6
12	1997	67,6	-4,1
13	1998	64,6	-4,4
14	1999	66,6	3,1
15	2000	68,3	2,6
16	2001	69,5	1,8
17	2002	68,8	-1,0
18	2003	68,9	0,1
19	2004	71,4	3,6
20	2005	72	0,8
21	2006	72,5	0,7
22	2007	72,8	0,4
23	2008	73,3	0,7
24	2009	73,6	0,4
25	2010	74,2	0,8
26	2011	74,6	0,7
27	2012	75,1	0,5
28	2013	75,6	0,7
29	2014	68,9	-8,9
30	2015	69,5	0,9

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa kondisi IPM Sumatera Utara selama tahun 1986-2015 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama periode tersebut, IPM di Provinsi Sumatera Utara hanya lima kali mengalami penurunan yaitu pada tahun 1994 IPM mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,6 persen. Penurunan IPM yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 cukup signifikan yaitu sebesar 4,1 dan 4,4 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 1999-2001 mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Kemudian, pada tahun 2002 kembali mengalami penurunan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2003-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 0,1 persen dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 8,9 persen.

Selain IPM yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara, tenaga kerja juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peranan tenaga kerja yaitu sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional dari segi kualitas atau jumlahnya. Jika jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah produksi yang juga meningkat.

Menurut Islam, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran yang mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai arti besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia. Bila tidak ada tangan manusia yang mengolah sumber daya alam yang tak terhitung jumlahnya, maka kekayaan alam akan tersimpan dan juga tidak akan bermanfaat.⁷

Masalah ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Utara pada masa sekarang ini diperkirakan akan semakin kompleks. Hal ini dilihat dari penambahan jumlah penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus

⁷Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.

bertambah, semakin banyaknya jumlah pengangguran dan lapangan pekerjaan yang terbatas karena kondisi perekonomian yang belum membaik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5
Pertumbuhan Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	Tenaga Kerja	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)
1	1986	3.4986.06	3,1
2	1987	3.950.504	12,9
3	1988	4.002.435	1,3
4	1989	4.138.792	3,4
5	1990	3.820.329	-7,7
6	1991	4.726.201	23,7
7	1992	4.099.809	-13,3
8	1993	4.193.152	2,3
9	1994	4.318.993	3,0
10	1995	4.493.198	4,0
11	1996	4.575.651	1,8
12	1997	4.642.766	1,5
13	1998	4.530.389	-2,4
14	1999	5.037.500	11,2
15	2000	4.947.539	-1,8
16	2001	4.977.323	0,6
17	2002	4.928.353	-1,0
18	2003	4.835.793	-1,9
19	2004	4.756.078	-1,6
20	2005	5.166.132	8,6
21	2006	4.859.647	-5,9
22	2007	5.082.797	4,6
23	2008	5.540.263	9,0
24	2009	5.765.643	4,1
25	2010	6.125.571	6,2
26	2011	5.912.114	-3,5
27	2012	5.751.682	-2,7
28	2013	5.899.560	2,6
29	2014	5.881.371	-0,3
30	2015	5.962.304	1,4

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 1986-2015 menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 1990, 1992, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2012 dan 2014. Pada tahun 1990 turun sebesar 7,7 persen dan kemudian pada tahun 1991 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,7 persen. Selanjutnya, pada tahun 1992 kembali turun sebesar 13,3 persen.

Penurunan tenaga kerja yang bekerja pada tahun 1998 sebesar 2,4 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen. Demikian juga, dari tahun 2000 hingga tahun 2004 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata penurunan yang terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2004 sebesar 1,5 persen.

Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 5.912.114 juta jiwa (3,5 persen) dan 5.751.682 juta jiwa (2,7 persen). Pada tahun 2014 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.881.371 atau 0,3 persen. Daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang tumbuh seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka perekonomian dapat dikatakan aman. Jika disuatu daerah banyak tenaga kerja yang produktif, otomatis mereka memiliki uang untuk kebutuhan hidup dan secara tidak langsung akan mendorong para produsen untuk memproduksi barang atau jasa yang diminta konsumen.

Disamping IPM dan tenaga kerja, inflasi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Inflasi

merupakan salah satu prospek pembangunan ekonomi jangka panjang yang menimbulkan akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan apabila tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁸

Laju inflasi di Sumatera Utara masih belum stabil, tergantung pada kondisi yang terjadi baik karena faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Misalnya secara fundamental tingginya inflasi tahun 2005 dapat terjadi karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sehingga memberi dampak makro yang cukup besar. Kondisi ini telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap harga terpuruk. Untuk mengetahui laju inflasi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6
Laju Inflasi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)

No	Tahun	Inflasi
1	1986	3,4
2	1987	7,3
3	1988	6,8
4	1989	6,6
5	1990	57,6
6	1991	8,9
7	1992	8,6
8	1993	9,7
9	1994	8,3
10	1995	7,2
11	1996	8,7
12	1997	13,1
13	1998	83,6
14	1999	11,4

⁸Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 15.

15	2000	15,7
16	2001	15,5
17	2002	10,5
18	2003	9,7
19	2004	6,2
20	2005	22,4
21	2006	6,1
22	2007	6,6
23	2008	10,7
24	2009	2,6
25	2010	8
26	2011	3,7
27	2012	3,9
28	2013	10,1
29	2014	8,2
30	2015	3,2

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa inflasi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Sejak krisis moneter melanda perekonomian Indonesia dimulai tahun 1997, inflasi Sumatera Utara menjadi 13,1 persen dan puncaknya pada tahun 1998 meningkat tajam sebesar 83,6 persen. Pada tahun 2000-2001 tingkat inflasi masih diatas 5 persen yang mencapai 15 persen setiap tahunnya

Pada tahun 2005, inflasi Sumatera Utara kembali naik tajam mencapai 22,4 persen. Pada tahun 2008 mencapai 10,7 persen naik sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2009-2010 laju inflasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil dimana pada tahun 2008 inflasi sebesar 2,6 persen dan tahun 2010 naik sebesar 8 persen. Pada tahun 2013 laju inflasi mencapai 10,2 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. IPM, tenaga kerja dan inflasi merupakan masalah

yang kompleks di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1994 dan 2002 IPM mengalami penurunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2000, 2002, 2003, 2004 dan 2014 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Kemudian, pada tahun 2000 inflasi naik, sedangkan pertumbuhan ekonomi naik dan pada tahun 2015 inflasi turun, pertumbuhan ekonominya turun.

Dari pemaparan serta beberapa fenomena di atas, IPM, tenaga kerja dan inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 1985-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, masalah-masalah yang peneliti temukan adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurun diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Jumlah tenaga kerja yang mengalami penurunan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Inflasi naik pertumbuhan ekonomi meningkat dan inflasi turun pertumbuhan ekonomi turun.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan inflasi

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian ini hanya mengambil studi kasus di Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ?
2. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ?

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat suatu variabel yang dapat diukur. Dapat pula dikatakan sebagai suatu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengukur suatu variabel.⁹ Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini.

⁹Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 147.

Tabel 1.7
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
IPM (X_1)	IPM adalah salah satu patokan umum yang mencerminkan sejauh mana kualitas sumber daya manusia di berbagai negara. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Perkapita 2. Angka Harapan Hidup 3. Angka Melek Huruf 	Rasio
Tenaga Kerja (X_2)	Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang mempunyai arti besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia. ¹¹	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	Rasio
Inflasi (X_3)	Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Harga Konsumen. 2. Indeks Harga Perdagangan Besar. 3. Indeks Harga Implisit 	Rasio

¹⁰Faisal Bahri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 88.

¹¹Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan. ¹³	Laju Produk domestik regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Rasio
-------------------------	---	--	-------

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
4. Untuk melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

¹³M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 57.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang materi mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta untuk meningkatkan pemahaman peneliti melalui telaah literatur dan data.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan referensi dan menambah kepustakaan. Karena keterbatasan peneliti, selanjutnya diharapkan agar lebih dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukannya.¹ Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:²

- 1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus.
- 2) Teknologi merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyediakan persediaan barang kepada penduduk.
- 3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Prof. Simon Kuznets juga menyatakan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada

¹M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 57.

²*Ibid.*

produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebangsanya, yaitu:³

1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

2) Peningkatan produktivitas

Laju kenaikan produktivitas dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk perkapita di negara maju.

3) Laju perubahan struktural yang tinggi

Pertumbuhan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif dan peralihan dari perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.

4) Urbanisasi

Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha non agraris sebagai hasil perubahan teknologi yang menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan. Karena sarana teknis transportasi, komunikasi dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif.

³*Ibid.*, hlm. 58.

5) Ekspansi negara maju

Ekspansi negara-negara maju terjadi akibat revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian melahirkan dominasi politik antar negara-negara jajahan. Unsur politik atau kekuatan dalam hubungan internasional merupakan faktor penting dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi modern. Artinya, saling ketergantungan semakin meningkat antara bangsa.

6) Arus barang, modal, migrasi

Arus barang, modal dan migrasi merupakan unsur dominan dari ekspansi keluar negara-negara maju.

b. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah sebagai berikut: ⁴

1) Sumber daya alam

Hasil kerja perekonomian suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh adanya ketersediaan sumber daya alam seperti tanah yang subur, hutan, perairan, minyak dan gas. Sumber daya alam yang melimpah dan murah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing dari suatu perekonomian. Eksistensi sumber daya alam menjadi penting jika dikelola dengan sebaik-baiknya.⁵

⁴Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 116.

⁵*Ibid.*

2) Modal

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa pendapatan yang akan ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output. Persediaan modal merupakan hal yang penting terhadap pertumbuhan output, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan output.⁶

3) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki posisi yang strategis untuk mendorong kemajuan perekonomian suatu bangsa. Tersedianya sumber daya manusia secara potensial akan berfungsi sebagai unsur pendorong kemajuan ekonomi dan daya saing suatu bangsa. Bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi akan mempunyai daya saing yang relatif lebih unggul dibanding dengan negara yang kekurangan sumber daya manusia.⁷

Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan kemampuan manusia. Proses tersebut dikonsentrasikan secara merata pada peningkatan reformasi kemampuan-kemampuan manusia melalui investasi pada diri manusia dan pemanfaatan dari kemampuan manusia untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.⁸

⁶*Ibid.*, hlm. 117.

⁷*Ibid.*, hlm. 119

⁸*Ibid.*, hlm. 121.

4) Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi menimbulkan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi yaitu, kemajuan teknologi dapat meningkatkan kegiatan memproduksi barang, menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah di produksi sebelumnya dan meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.⁹

c. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith, manusia adalah faktor produksi utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan alasan tanah tidak ada artinya jika tidak dikelola oleh manusia yang pandai sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Adam Smith dalam pandangan lainnya adalah spesialisasi. Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja perlu adanya dorongan spesialisasi atau pembagian kerja. Salah satu cara yang baik untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja adalah mendorong spesialisasi dimana orang dapat mengerjakan sesuatu yang terbaik sesuai keahlian yang dimilikinya. Produktifitas tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁰

⁹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 431.

¹⁰Junaidin Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 117 .

2) Teori Rostow

W.W. Rostow dalam bukunya *The Stages Of Economic Growth* (1965), mengemukakan lima tahapan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:¹¹

a) Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional (the traditional society) ditandai dengan masyarakatnya masih menggunakan metode produksi yang sangat primitif dengan kebiasaan turun temurun. Masyarakat belum menguasai ilmu pengetahuan, belum bisa menguasai alam dan manusia masih tunduk kepada alam. Produktifitas tenaga kerja juga masih rendah, sektor pertanian masih dominan dan struktur sosial yang hirarki.¹²

b) Prasyarat tinggal landas

Tahap prasyarat tinggal landas (*the precondition for take off*) ditandai dengan dilakukannya berbagai transformasi di seluruh sektor kehidupan, seperti dari sektor pertanian ke sektor perkotaan, semakin besarnya tingkat tabungan dan diikuti oleh kenaikan tingkat investasi baik yang dilakukan negara maupun individu. Semakin maraknya penggunaan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru dan campur tangan

¹¹*Ibid.*, hlm. 113.

¹²*Ibid.*, hlm. 114.

dari luar dari masyarakat yang sudah maju, karena secara internal tidak mampu mengembangkan dirinya.¹³

c) Tinggal landas

Tahap tinggal landas (*the take off*), tahap ini dipandang sebagai tahap paling krusial dalam sejarah ekonomi satu negara. Karena pada tahap ini terjadi berbagai perubahan perubahan yang drastis, baik berbentuk revolusi politik dan terciptanya berbagai inovasi dan munculnya pasar-pasar baru. Semakin meningkatnya kecenderungan menabung dan investasi yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga melampaui tingkat pertumbuhan penduduk.¹⁴

Rostow menyatakan bahwa syarat utama untuk *take off*, adalah negara harus mampu memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu *pertama* kenaikan dalam laju investasi produktif dari sekitar 5% atau kurang menjadi lebih dari 10% dari pendapatan nasional, *kedua* pengembangan sektor industri pengolahan yang semakin pesat dan yang *ketiga* adanya kerangka politik, sosial dan kelembagaan yang cepat dapat memberi karakter yang bersifat terus-menerus pada pertumbuhan ekonomi.¹⁵

d) Menuju kedewasaan

Tahap keempat yaitu menuju kedewasaan (*the drive to maturity*). Tahap ini ditandai dengan industri yang berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi secara efektif disemua sektor produksi, peralihan sektor pemimpin (*leading sector*),

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*, hlm. 114.

keahlian tenaga kerja yang semakin meningkat dan terjadi perubahan-perubahan sosial.¹⁶

e) Masa konsumsi tinggi

Tahap terakhir adalah masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*). Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumsien dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan yaitu, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas.¹⁷

Ada tiga kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap purna dewasa ini. *Pertama*, penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. *Kedua*, ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif. *Terakhir*, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah mewah dan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik.¹⁸

¹⁶*Ibid.*

¹⁷M.L Jhingan, *Op.Cit.*, hlm 149

¹⁸*Ibid.*

3) Teori Neoklasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T. W. Swan (1956) dari Australia. Menurut teori neoklasik, pertumbuhan output bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan peningkatan teknologi. Sedangkan salah satu alat mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia.¹⁹

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.²⁰

4) Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Schumpeter menyatakan makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan

¹⁹M.P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.150

²⁰*Ibid.*

untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya dan pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”.²¹

Pada sistem Schumpeter, gerakan inflasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi, tetapi gerakan tersebut tidak mencakup inflasi jangka panjang. Tingkat harga jangka panjang tetap stabil. Namun demikian, dalam ekonomi terbelakang bebas inflasi sangat kuat. Bukan hanya pembangunan dan investasi terkait yang menjadi penyebab kecenderungan inflasi, tapi seluruh iklim sosial dari perekonomian yang berorientasikan permintaan.²²

Teori Schumpeter menggarisbawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan inflasioner merupakan satu metode tepat yang kini dicoba untuk diterapkan oleh setiap negara terbelakang. Analisanya relevan dengan negara terbelakang dilihat dari segi kenaikan jangka panjang produktivitas dan penyerapan surplus tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang menguntungkan sebagai akibat dari inovasi.²³

²¹Sadono Sukirno, *Loc. Cit.*

²²M.L Jhingan, *Op. Cit.*, hlm 132

²³*Ibid.*

5) Teori Harrod-Domar

Dalam analisisnya Harrod-Domar menunjukkan bahwa barang-barang modal yang sudah mencapai kapasitas penuh dan pengeluaran agregat pada tahun tertentu, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku pada tahun tertentu akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun berikutnya.²⁴

6) Teori Lewis

Prof. Arthur Lewis membangun teori sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tak terbatas dengan upah sekedar cukup untuk hidup. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Sedangkan, sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Pada sektor ini, *output* perkapita lebih rendah dibanding pada sektor kapitalis.²⁵

Menurut Lewis, modal tidak hanya diciptakan dari laba, modal juga diciptakan melalui kredit bank. Namun, pembentukan

²⁴*Ibid.*, hlm. 435.

²⁵*Ibid.*, hlm. 159.

modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasi harga pada beberapa waktu. Bilamana buruh surplus digunakan di sektor kapitalis dan dibayar dari uang yang diciptakan, harga akan naik karena pendapatan naik sementara output barang-barang konsumen tetap konstan.²⁶

Prof. Lewis mengatakan, inflasi dengan maksud pembentukan modal adalah sesuatu yang aneh, karena membunuh dirinya sendiri, artinya produksi barang konsumen gagal meningkat secara cepat karena kekakuan struktural. Harga-harga mulai naik tetapi lambat atau cepatakan disusul dengan kenaikan output dan mungkin pada tingkat akhir harga akan lebih rendah dari sebelumnya.²⁷

d. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi memiliki arti berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketertinggalan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.²⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. Huud ayat 61.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 160.

²⁸Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengan Krisis Global* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 26.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (QS. Huud : 61)²⁹

Lafadz *imaarah* dalam ayat tersebut, bermakna pertumbuhan atau kebangkitan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Lafadz *imaarah* sebenarnya lebih umum dari pertumbuhan ekonomi, seperti yang didefinisikan oleh ahli ekonomi. *Imaarah* dimaksudkan bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan materi, tetapi mencakup nilai-nilai spritualisme, yaitu beribadah kepada Allah.³⁰

2. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nation Development Progamme*), mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut

²⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 228.

³⁰Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hlm. 141.

penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu.³¹

Faisal Bahri dan Haris Munandar berpendapat bahwa, IPM digunakan sebagai patokan umum yang mencerminkan sejauh mana kualitas sumber daya manusia di berbagai negara. Dalam analisis umum yang biasa diberikan UNDP, dinyatakan bahwa kenaikan 1 persen skor IPM akan mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja hingga 2,5 persen dan hal ini akan segera disusul dengan kenaikan tambahan pertumbuhan pendapatan perkapita nasional sebesar 1,5 persen.³²

Sebagai tolok ukur sumber daya manusia, secara konseptual IPM adalah perhitungan formula tertentu yang memadukan tiga komponen utama, yaitu:³³

1. Kualitas hidup materiil yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita tahunan.
2. Kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup.
3. Kondisi pendidikan yang diwakili oleh indikator tingkat melek huruf.

³¹Nurul Izzah, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau," dalam *Jurnal At-Tijarah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015, hlm. 3.

³²Faisal Bahri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 88.

³³*Ibid.*

b. Komponen-Komponen IPM

Komponen-komponen yang dilihat dalam mengukur IPM didasarkan pada komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari angka harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan layak. Penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-0,10 yang terdiri dari:³⁴

Kategori rendah : nilai IPM 0-0,05

Kategori menengah : nilai IPM antara 0,51-0,79

Kategori tinggi : nilai IPM 0,8-1

c. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Menurut pemikiran pembangunan paradigma Islam Ibnu Khaldun dan Shah Wali Allah, Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya.³⁵

Misi manusia menjadi pengabdian bagi pencipta-Nya, sementara ibadah dan pengabdian pada Sang Pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena Islam, bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan

³⁴Nurul Izzah, *Loc. Cit*

³⁵Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004) hlm. 22.

berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil tidak bisa dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.³⁶

Indikator keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin terjadinya perubahan, baik perubahan teknologi maupun sosial ekonomi. Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam Islam. Oleh karena itu, faktor etika, moral dan spiritual merupakan faktor pembentuk aspek kualitas pertumbuhan yang akan dicapai.³⁷

Tujuan pembangunan dalam perspektif Islam adalah tercapainya kesuksesan di akhirat. Jika konsep seseorang tidak sesuai, semua yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga tidak akan sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa jika manusia sebagai agen pembangunan tidak menanamkan dan menjalankan nilai moral dan etika universal, tidak ada jaminan bahwa akan sukses. Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minin ayat 1-11.³⁸

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
 ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

³⁶*Ibid.*, hlm. 23.

³⁷*Ibid.*, hlm. 24.

³⁸*Ibid.*, hlm. 25.

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
 مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
 ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ لَفِرْدَوْسٍ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. dan orang-orang yang menunaikan zakat. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Mu'minun: 1-11)³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan pembangunan dalam perspektif Islam adalah tercapainya kesuksesan di akhirat. Menurut Allah, sukses adalah apabila kita selamat dari neraka dan masuk kedalam surga. Inilah yang disebut kebahagiaan hakiki. Dalam Al-

³⁹Departemen Al-Qur'an RI, *Op.Cit.*, hlm. 342.

Qur'an, orang-orang yang sukses disebut sebagai orang-orang yang akan mewarisi Surga Firdaus.⁴⁰

Ada lima tahapan utama yang harus dilalui agar tujuan akhir proses pembangunan tercapai sukses di akhirat, yaitu:⁴¹

1. Aspek kualitatif yang bersumber dari manusia, artinya dengan akidah yang baik manusia akan mampu melaksanakan syariat dengan baik, yang akhirnya tercermin pada muamalat.
2. Kedudukan manusia dalam sebuah sistem, artinya status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat sebagai suatu sistem dalam kehidupan sehari-hari.
3. Terciptanya keuntungan kualitatif dan kuantitatif, seperti kekayaan alam, keuntungan teknologi, keuntungan sosial-ekonomi, kepuasan spiritual dan moral.
4. Utilisasi hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya, artinya penekanan Islam pada manusia ditujukan untuk menjaga terjadinya keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan secara merata atas penggunaan faktor-faktor produksi .
5. Tercapainya kesuksesan di akhirat.

3. Tenaga kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja di dalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas. Setiap pekerjaan, baik manual maupun

⁴⁰Mudrajat Kuncoro, *Loc .Cit.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 27.

mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Setiap kerja yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi, bukan kerja. Menurut Marshall tenaga kerja dalam pengertian ini mencakup *professional skill* yang amat tinggi dari jenis apapun juga, hingga tenaga kerja yang tidak memiliki *skill*.⁴²

Penduduk dalam usia kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu:⁴³

- 1) Angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
- 2) Bukan angkatan kerja, yaitu penduduk bukan dalam angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga, murid atau mahasiswa, penerima pendapatan dan lain-lain.

b. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai arti besar. Karena, semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia.⁴⁴

⁴²Muhammad Sharif Chaundri, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 184.

⁴³Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 17-18.

⁴⁴Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi yang didasari konsep *istikhaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.⁴⁵

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 97.⁴⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)⁴⁷

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 278.

untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS.Al-Balad ayat 4:⁴⁸

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (QS. Al-Balad: 4)⁴⁹

Kata *kabad* dalam ayat tersebut, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Oleh karena itu, manusia diwajibkan berjuang dan bersusah payah untuk mencapai kejayaan di dunia dan dia dijadikan kuat dari segi fisik untuk menanggulangi kesusahan hidup.⁵⁰

c. Kontrak Tenaga Kerja (*Ijarah*) dalam Perspektif Islam

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. Hal-hal yang terkait dengan kontrak tenaga kerja, yaitu:⁵¹

- 1) Ketentuan kerja, dalam kontrak kerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah,serta tenaganya.

⁴⁸Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 228.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 594.

⁵⁰Nurul Huda, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 228.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 230.

- 2) Bentuk kerja, tiap pekerjaan halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam kontrak tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan
- 3) Waktu kerja, dalam kontrak tenaga kerja harus disebutkan jangka waktu pekerjaan yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu.
- 4) Gaji kerja, diisyaratkan juga gaji kontrak tenaga kerja tersebut dengan jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi kontrak boleh tunai dan boleh juga tidak, sesuai dengan syarat yang ditentukan.

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang dan jasa.⁵²

⁵²Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:⁵³

1) Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, yaitu jangka waktu seminggu, sebulan, triwulan dan setahun.

2) Bersifat umum

Kenaikan harga komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Jika harga BBM naik maka harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis, maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain.

3) Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya harga hanya sesaat. Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan.

⁵³Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 359.

Menurut Nurul Huda, dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, yaitu prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Jika inflasi tidak dicegah dengan cepat, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional diantaranya, sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Investasi berkurang;
- 2) Mendorong tingkat bunga;
- 3) Mendorong penanam bunga yang bersifat spekulatif;
- 4) Menimbulkan kegagalan dalam pembangunan;
- 5) Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dimasa yang akan datang;
- 6) Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang;
- 7) Menimbulkan defisit neraca pembayaran;
- 8) Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia;
- 9) Meningkatnya jumlah pengangguran.

b. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:⁵⁵

⁵⁴Nurul Huda, dkk, *Op. Cit.*, hlm.181

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 359.

1) Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Dan pengeluaran yang berlebihan akan menimbulkan inflasi.

2) Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, maka perusahaan akan menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

3) Inflasi diimpor

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak.

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu:⁵⁶

- 1) *Policy induced*, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
- 2) *Cosh-push inflation*, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
- 3) *Demand-full inflation*, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.
- 4) *Inertial inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.

Menurut Paul A. Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu:⁵⁷

- 1) *Moderate inflation*, adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

⁵⁶Nurul Huda, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 177.

⁵⁷Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 138.

- 2) *Galloping inflation*, inflasi ini terjadi pada tingkatan 20 persen sampai 200 persen per tahun. Pada tingkat inflasi ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil.
- 3) *Hyper inflation*, inflasi ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun.

c. Teori-teori Inflasi

- 1) Teori kuantitas uang (*Quantity Theory of Money*)

Kecepatan peredaran uang ditentukan oleh perkembangan faktor kelembagaan sektor keuangan dalam waktu jangka pendek. Faktor yang menentukan kuantitas uang, yaitu hubungan antara keinginan mempertahankan harga tetap, saldo kas dan pendapatan.⁵⁸

- 2) Teori *Demand Pull*

Teori ini menyatakan bahwa peningkatan harga umum terjadi akibat terdapatnya permintaan yang berlebihan (*excess demand*) atas barang dan jasa oleh konsumen dan investor sehingga melebihi kapasitas potensial dalam ekonomi.⁵⁹

- 3) Teori *Cost-Push*

Teori ini mengemukakan bahwa ketidaksempurnaan pasar adalah akar penyebab peningkatan harga umum. Kenaikan harga

⁵⁸Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 230.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 232.

umum terjadi karena kenaikan biaya produksi dan produsen-produsen yang menguasai pasar yang menuntut kenaikan upah.⁶⁰

4) Teori *Hybrid*

Teori ini menyatukan penyebab inflasi yang disebabkan tarikan permintaan dan penyebab inflasi yang disebabkan dorongan biaya produksi. Situasi yang disebabkan oleh faktor biaya produksi akan menaikkan permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen untuk memperoleh pendapatan.⁶¹

5) Teori Moneteris

Menurut teori ini inflasi terjadi akibat adanya pertumbuhan uang yang beredar jauh melebihi pertumbuhan permintaan akan uang. Jika jumlah uang beredar bertambah melebihi permintaan akan uang, maka permintaan untuk barang dan jasa akan bertambah sehingga akan mengakibatkan pertambahan produksi atau kenaikan harga.⁶²

d. Cara Mengatasi Inflasi

Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, yaitu:⁶³

1) Menambah *supply* barang

Menambah *supply* barang dilakukan pemerintah dengan tidak menaikkan BBM dalam negeri, walau saat ini harga BBM

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 233.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 234.

⁶²*Ibid.*

⁶³Masyhuri Machfudz dan M.Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 193.

tersebut meningkat pesat di pasaran internasional. Hal ini dilakukan pemerintah semata-mata tidak ikut mendorong naiknya biaya produksi. Jika biaya produksi tidak bertambah, maka tidak ada alasan bagi produsen untuk menaikkan harga jual produknya.

2) Kebijakan moneter-perbankan

Kebijakan moneter efektif mengendalikan inflasi yang bersumber utama berupa kelebihan permintaan agregat atau inflasi tarikan permintaan. Kebijakan ini dilakukan dengan penurunan jumlah uang beredar.

3) Kebijakan fiskal

Kebijakan ini dilakukan dengan penurunan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal akan lebih efektif untuk menanggulangi inflasi sebagai simpanan atau tabungan negara.

4) Kebijakan pengendalian harga langsung

Kebijakan ini meliputi penentuan harga maksimum untuk barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan agar secara langsung dapat mencegah terjadinya kenaikan harga barang-barang tersebut dan menyebar ke sektor ekonomi dan produksi lain.

e. Inflasi dalam Perspektif Islam

Menurut Al-Maqrizi peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena yang menimpa kehidupan masyarakat diseluruh dunia sejak

masa dahulu hingga sekarang. Inflasi menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus menerus.⁶⁴

Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu:⁶⁵

- 1) Inflasi alamiah, inflasi jenis ini disebabkan karena faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurutnya, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Dilain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan.
- 2) Inflasi karena kesalahan manusia, inflasi jenis ini terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi ini terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ



⁶⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Loc.Cit.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 425.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶⁶

Al-Maqrizi telah mengidentifikasi tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut, yaitu:

a) Korupsi dan administrasi yang buruk

Menurut Al-Maqrizi pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi dalam kemewahan hidup. Hal ini berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.

b) Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 408.

c) Peningkatan sirkulasi mata uang fulus

Mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya yang dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Maqrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga membumbung tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menguji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nurul Izzah	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau tahun 1994-2013. Jurnal <i>At-Tijarah</i> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2015.	IPM (X1), Inflasi (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau dan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.
2	Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati	Pengaruh IPM dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UNESA, Kampus Kelintang Surabaya.	IPM (X1), Inflasi (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan.

3	Rusmarinda Rakhmawati	Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	IPM (X1), Tenaga Kerja (X2), Pendidikan (X3), Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, sedangkan tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
4	Kurnia dan Sri Isnowati	Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2010. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, 2014.	Investasi (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Tenaga kerja (X3), Pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Izzah	- Pengolahan data <i>time series</i> . - Penggunaan variabel IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini dilakukan di provinsi Riau tahun 1994-2013
2.	Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati	Penggunaan variabel IPM, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini dilakukan di kabupaten Lamongan tahun 2001-2002.
3.	Rusmarinda Rakhmawati	Penggunaan variabel IPM dan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.	- Pengolahan data <i>cross section</i> tahun 2013 sebanyak 35 kabupaten/kota. - Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah tahun 2013.
4	Kurnia Maharani dan Sri Isnowati	- Penggunaan variabel tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi - Pengolahan data <i>time series</i> .	- Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

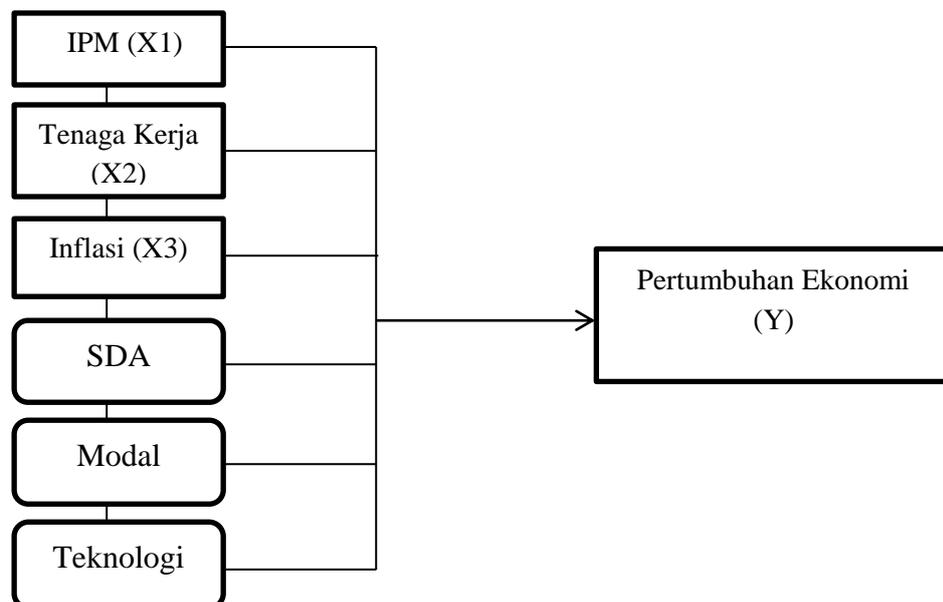
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Di dalam kerangka pikir akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan,

yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk perspektif terhadap masalah penelitian.⁶⁷

Menurut para ekonom ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi dan kemajuan teknologi. Namun, penulis hanya meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan inflasi. Model kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir



IPM merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja juga turut berpengaruh terhadap pertumbuhan

⁶⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporanannya)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 75.

ekonomi, karena tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Disamping IPM dan tenaga kerja, inflasi juga merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian.⁶⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumsukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀1 = Tidak terdapat pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

H_a1 = Terdapat pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

H₀2 = Tidak terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

H_a2 = Terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

⁶⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 68.

- H_03 = Tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.
- H_a3 = Terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.
- H_04 = Tidak terdapat pengaruh IPM, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.
- H_a4 = Terdapat pengaruh IPM, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu tahun 1986 sampai 2015. Penelitian ini dilakukan dari Februari sampai Mei 2017.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel.¹

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.² Data yang digunakan adalah *data time series*, yaitu data yang berdasarkan runtut waktu atau rangkaian nilai yang diambil pada waktu

¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2015), hlm. 12.

²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

yang berbeda. Data diperoleh melalui dokumentasi di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data IPM, tenaga kerja, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 1986-2015.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat di definisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan sebuah isu yang krusial yang dapat menentukan keabsahan hasil penelitian.⁴

Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang

³*Ibid.*, hlm. 80.

⁴Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 74.

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.⁵ Adapun kriteria dalam pengumpulan sampel yaitu tersedianya laporan pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan inflasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara melalui website resmi *www.bps.go.id*.

Sampel dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan inflasi Provinsi Sumatera Utara tahun 1985-2015. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 sampel.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu dilakukan teknik analisis data. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program *Eviews 9* dan data *time series*.

a. Analisis Regresi Berganda

Regresi dapat dikatakan linear berganda jika variasi peubah yang akan diperkirakan dijelaskan oleh variasi dari beberapa peubah penjelas (lebih dari satu peubah penjelas). Artinya, terdapat beberapa variabel independen yaitu $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ yang mempengaruhi satu variabel dependen / Y . Model untuk regresi berganda pada umumnya dapat ditulis melalui persamaan berikut:

$$\text{GROWTH} = \beta_0 + \beta_1\text{IPM} + \beta_2\text{TK} + \beta_3\text{INF} + e$$

⁵Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2013), hlm. 76.

Keterangan:

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi

β_0 = Konstanta

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

TK = Tenaga Kerja

INF = Inflasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Koefisien Pengganggu

b. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan antara lain:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak diperlukan uji normalitas. Uji normalitas dapat ditempuh dengan uji *Jarque-Berra* (JB test). Apabila nilai *p-value* > tingkat signifikansi maka residual terdistribusi normal.⁶

⁶Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai EViews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 42.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi diatas 90%, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.⁷

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $VIF > 10$. Jika nilai $VIF < 10$ artinya tidak terjadi multikolinearitas.⁸

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi jika residual membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, maka dilakuka uji *White Heteroscedasticity*. Jika nilai F

⁷Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: 2005), hlm. 91.

⁸*Ibid.*

dan *Obs*R-Squared* lebih besar dari X^2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁹

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, jika probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi.¹⁰

c. Uji Hipotesis

1) Uji t-test

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila *p-value* $> \alpha$ maka H_a diterima.¹¹

⁹Shochrul Ajija, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 40.

¹¹*Ibid.*, hlm. 34.

2) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independe secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika *p-value* $> \alpha$ maka H_a diterima.¹²

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka berarti bahwa variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 40.

¹³*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia terletak pada garis 1^0-4^0 Lintang Utara dan 98^0-100^0 Bujur Timur. Letak Provinsi ini sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta diapit oleh tiga provinsi dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.¹

Luas dataran Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di dataran Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik bagian barat maupun timur pantai pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas wilayah 6.262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau sekitar 8,40 persen,

¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, (Medan: BPS, 2015), hlm.

kemudian diikuti Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.²

Berdasarkan letak dan kondisi alamnya, Provinsi Sumatera Utara di bagi menjadi tiga kelompok wilayah yaitu:

1. Pantai Barat (Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Sibolga dan Gunung Sitoli).
2. Daratan Tinggi (Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Phakpak Barat, Samosir dan Pematang Siantar).
3. Pantai Timur (Labuhan Batu, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai).³

2. Kondisi Demografi Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh penduduk dari berbagai suku seperti Melayu, Batak, Nias Aceh, Minangkabau, Jawa, dan berbagai suku lainnya.

Pada tahun 2015 penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.937.797 jiwa yang terdiri dari 6.954.552 jiwa penduduk laki-laki dan 6.983.245

56. ²Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2016*, (Medan: BPS, 2016), hlm.

³*Ibid.*

jiwa perempuan dengan ratio jenis kelamin /*sex ratio* sebesar 99.59 dan penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan adalah 6,69 juta jiwa (48,01 persen) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 7,25 juta jiwa (51,99 persen).⁴

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB Sumatera Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp. 440.955.850.000.000. Jika dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatera, maka PDRB Sumatera Utara menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Riau. Perannya terhadap pembentukan PDRB Pulau Sumatera tahun 2015 sebesar 22,09 persen, sedangkan terhadap PDB Nasional sebesar 4,95 persen.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki potensial yang sangat luas dan potensial yang dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan areal pertanian, oleh

⁴Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2016*, (Medan: BPS, 2016), hlm. 105.

karena itu kegiatan terpenting perekonomian masih mengandalkan sektor pertanian. Disamping itu, laut, danau dan sungai juga merupakan potensi yang tidak kalah pentingnya. Ini digunakan sebagai potensi perikanan, perhubungan, industri, perdagangan, dll. Dengan demikian, struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Utara berada pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Jumlah PDRB dan distribusi PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah PDRB dan Distribusi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)	Distribusi PDRB (%)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	110.123,24	24,97
Pertambangan dan Penggalian	5.829,94	1,32
Industri Pengolahan	85.968,40	19,50
Pengadaan Listrik dan Gas	541,31	0,12
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	421,96	0,10
Konstruksi	54.248,91	12,3
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	77.037,55	17,47
Transportasi dan Pergudangan	20.155,59	4,57
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	9.866,78	2,24
Informasi dan Komunikasi	11.055,36	2,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.957,95	3,17
Real Estat	18.119,23	4,11
Jasa Perusahaan	3.836,94	0,87
Administrasi pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	14.642,06	3,32
Jasa Pendidikan	8.904,74	2,02
Jasa Kesehatan	4.066,72	0,92
Jasa Lainnya	2.179,19	0,49
PDRB	440.955,85	100

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, terlihat bahwa jumlah PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar Rp. 440.955.850.000.000 lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Kontribusi terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai sebesar 24,97 persen. Selanjutnya, diikuti lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,50 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 17,47 persen. Sementara itu lapangan usaha lainnya masing-masing memberikan kontribusi dibawah 5 persen.

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisa pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktivitas dari berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Setiap tahun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diwarnai dengan berbagai perkembangan berdasarkan berbagai indikator ekonomi. Perkembangan ini dapat terlihat pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dampak krisis moneter yang berlangsung sejak tahun 1998 berpengaruh terhadap perekonomian misalnya, terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dollar dan inflasi yang melambung tinggi.

Sebelum terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 kondisi perekonomian Sumatera Utara tidak terlalu buruk. Namun, sejak krisis melanda Indonesia terjadi perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	1986	6,3
2	1987	8,7
3	1988	11,2
4	1989	-9,6
5	1990	-6,3
6	1991	7,6
7	1992	-7,4
8	1993	-6,4
9	1994	6,5
10	1995	9,3
11	1996	-8,8
12	1997	-8,2
13	1998	-10,9
14	1999	2,6
15	2000	4,8
16	2001	-3,7
17	2002	4
18	2003	4,5
19	2004	5,7
20	2005	-5,5
21	2006	6,2
22	2007	6,9
23	2008	-6,4
24	2009	-5
25	2010	6,4
26	2011	6,7
27	2012	-6,2
28	2013	-6,1

29	2014	-5,2
30	2015	-5,1

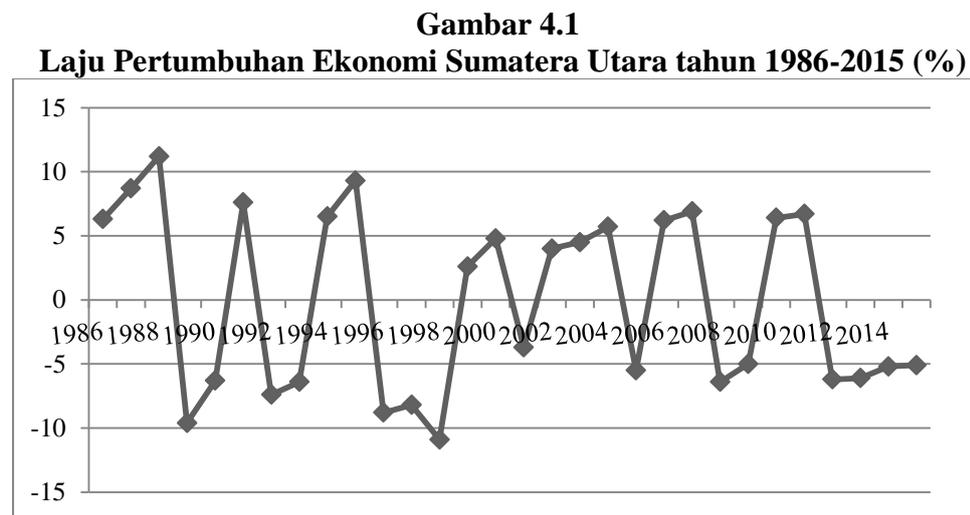
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada tahun 1988 yaitu sebesar 11,2 persen. Pada saat ini kontribusi dari sektor ekonomi cukup berkembang, kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 1995 kembali meningkat sebesar 9,3 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya peranan dari beberapa sektor ekonomi seperti, pertanian, transportasi, industri, perdagangan, hotel dan restoran.

Perekonomian Sumatera Utara berusaha bangkit dengan perbaikan berbagai indikator ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi Sumatera Utara yang lebih baik lagi. Pasca krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1999 sampai 2000 mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dan 4,8 persen dan kembali menurun pada tahun 2001 sebesar 3,7 persen. Selanjutnya, pada tahun 2003 sampai 2004, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 tumbuh 5,7 lebih tinggi dari tahun 2003 yang sebesar 4,5 persen. Hal ini menunjukkan indikator ekonomi relatif mengalami perbaikan, sehingga turut untuk mempengaruhi roda perekonomian Sumatera Utara secara keseluruhan

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,5 persen. Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini.



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1986-2015 mengalami fluktuasi yang sangat mencolok. Laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi di Indonesia sebesar -10,9 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 ini disebabkan karena merosotnya nilai tukar rupiah yang terjadi di Indonesia

2. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritas yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk

memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998 melanda Provinsi Sumatera Utara, IPM di Sumatera mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. IPM yang mengalami penurunan di Provinsi Sumatera Utara terkhusus beberapa tahun belakangan ini, terjadi karena beberapa faktor seperti banyaknya terjadi bencana alam, kerusuhan dan peningkatan kriminalitas. Untuk lebih jelasnya, perkembangan IPM Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Perkembangan IPM Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
1	1986	58,1	3,9
2	1987	62,5	7,6
3	1988	62,6	0,2
4	1989	63,8	1,9
5	1990	67,9	6,4
6	1991	68,1	0,3
7	1992	68,7	0,9
8	1993	70,3	2,3
9	1994	69,2	-1,6

10	1995	70,1	1,3
11	1996	70,5	0,6
12	1997	67,6	-4,1
13	1998	64,6	-4,4
14	1999	66,6	3,1
15	2000	68,3	2,6
16	2001	69,5	1,8
17	2002	68,8	-1,0
18	2003	68,9	0,1
19	2004	71,4	3,6
20	2005	72	0,8
21	2006	72,5	0,7
22	2007	72,8	0,4
23	2008	73,3	0,7
24	2009	73,6	0,4
25	2010	74,2	0,8
26	2011	74,6	0,7
27	2012	75,1	0,5
28	2013	75,6	0,7
29	2014	68,9	-8,9
30	2015	69,5	0,9

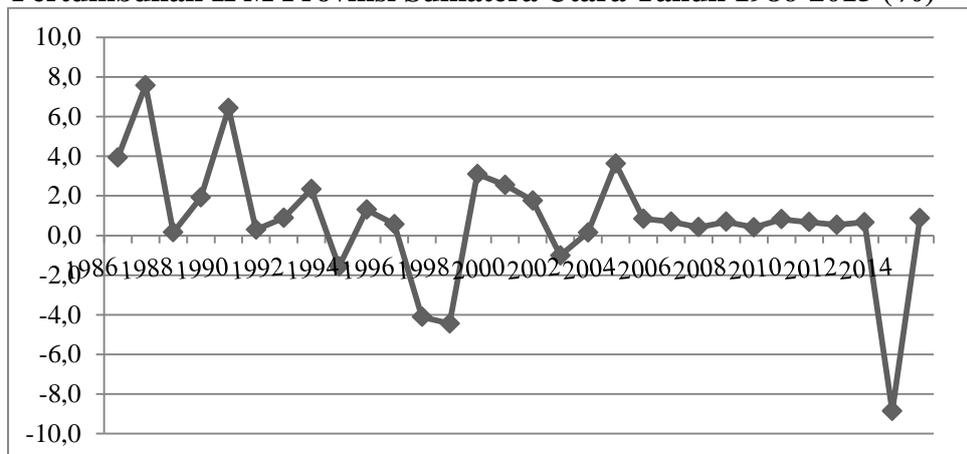
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kondisi IPM Sumatera Utara selama tahun 1986-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 1994, 1997, 1998, 2002 dan 2014. Rata-rata jumlah peningkatan IPM adalah 0,8 persen. Menurut *Indonesian Human Development Report 2004*, perkembangan pembangunan manusia tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Pada tahun 1994 IPM mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,6 persen. Penurunan IPM yang terjadi pada

tahun 1997 dan 1998 cukup signifikan yaitu sebesar 4,1 dan 4,4 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan IPM yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 merupakan dampak dari krisis ekonomi di Indonesia, karena merosotnya pertumbuhan ekonomi, sehingga pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan relatif sedikit. Kemudian pada tahun 2002 IPM kembali mengalami penurunan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2
Pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan IPM di Provinsi Sumatera Utara masih dalam kategori *upper-medium* yaitu antara 58 dan 75,6. Nilai IPM di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kemajuan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas manusia.

3. Tenaga Kerja di Sumatera Utara

Tenaga kerja merupakan unsur utama dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Tenaga kerja merupakan bagian penting dari penduduk dimana pertumbuhan tenaga kerja sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Faktor yang mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan yaitu faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan mempengaruhi kesediaan tenaga kerja di suatu daerah.

Masalah ketenagakerjaan terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, dalam masa sekarang ini diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus bertambah dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang ditutup. Perkembangan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	Tenaga Kerja	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)
1	1986	3.4986.06	3,1
2	1987	3.950.504	12,9
3	1988	4.002.435	1,3
4	1989	4.138.792	3,4
5	1990	3.820.329	-7,7
6	1991	4.726.201	23,7
7	1992	4.099.809	-13,3
8	1993	4.193.152	2,3
9	1994	4.318.993	3,0
10	1995	4.493.198	4,0
11	1996	4.575.651	1,8
12	1997	4.642.766	1,5
13	1998	4.530.389	-2,4
14	1999	5.037.500	11,2
15	2000	4.947.539	-1,8
16	2001	4.977.323	0,6
17	2002	4.928.353	-1,0
18	2003	4.835.793	-1,9
19	2004	4.756.078	-1,6
20	2005	5.166.132	8,6
21	2006	4.859.647	-5,9
22	2007	5.082.797	4,6
23	2008	5.540.263	9,0
24	2009	5.765.643	4,1
25	2010	6.125.571	6,2
26	2011	5.912.114	-3,5
27	2012	5.751.682	-2,7
28	2013	5.899.560	2,6
29	2014	5.881.371	-0,3
30	2015	5.962.304	1,4

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 1986-2015 menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 1990, 1992, 1998,

2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012 dan 2014. Rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja sebesar 1,9 persen. Hal ini disebabkan karena adanya upaya dari pemerintah daerah yang memberikan kemudahan kepada para investor dalam menanamkan investasinya di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menyebabkan penyerapan tenaga kerja.

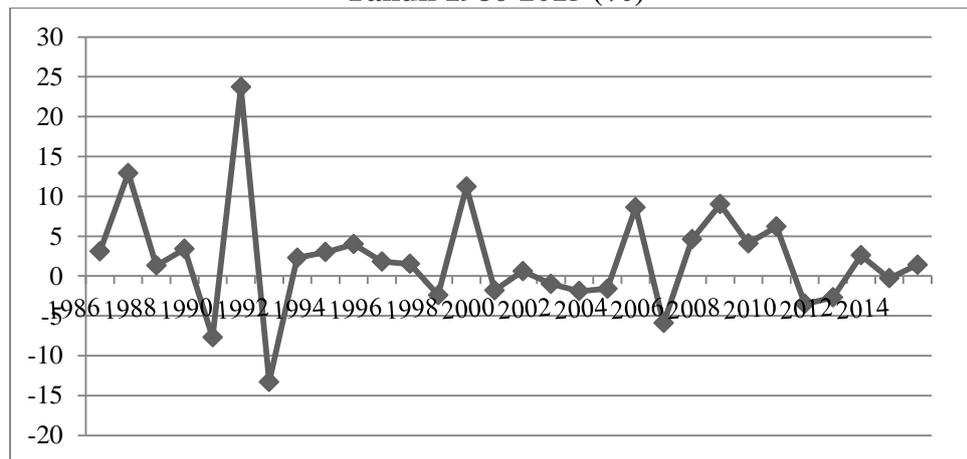
Penurunan tenaga kerja yang bekerja pada tahun 1998 sebesar 2,4 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen. penurunan tenaga kerja yang terjadi pada tahun 1998 merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, sehingga banyak sektor riil yang terpaksa tutup dan menyebabkan sebagian tenaga kerja mencari pekerjaan ke luar Sumatera Utara.

Demikian juga, dari tahun 2000 hingga tahun 2004 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata penurunan yang terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2004 sebesar 1,5 persen. Hal ini juga disebabkan karena situasi perekonomian yang masih sulit khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 5.912.114 juta jiwa (3,5 persen) dan 5.751.682 juta jiwa (2,7 persen) dan kembali naik pada tahun 2013 sebesar 5.899.560 juta jiwa atau naik 2,5 persen. Pada tahun 2014 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.881.371 dan kembali naik pada tahun 2015 sebesar 5.962.304 juta jiwa

atau 1,4 persen. Untuk lebih jelasnya, perkembangan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini.

Gambar 4.3
Perkembangan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1986-2015 (%)



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat, bahwa pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi karena jumlah penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus bertambah dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Hal ini terjadi karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang ditutup.

4. Inflasi di Sumatera Utara

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kenaikan harga-harga barang dan jasa di daerah tersebut. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi permintaan dan penawaran. Namun pada kenyataannya

tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga, kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijakan pemerintah.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika inflasi terjadi secara berkepanjangan tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena kebanyakan orang ingin menyimpan uangnya di bank tanpa berpikir untuk berinvestasi yang dimana investasi merupakan faktor yang paling menunjang bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebelum krisis moneter terjadi, laju inflasi di Sumatera Utara masih berada pada posisi yang tidak terlalu parah. Namun, pada tahun 1998 sejak krisis melanda perekonomian inflasi melonjak tajam mencapai 83,56 persen. Hal ini menunjukkan tingkat inflasi yang paling parah yang pernah terjadi dalam perekonomian Sumatera Utara sehingga mengakibatkan biaya produksi meningkat tajam. Laju inflasi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Laju Inflasi Sumatera Utara Tahun 1986-2015

No	Tahun	Laju Inflasi (%)
1	1986	3,4
2	1987	7,3
3	1988	6,8
4	1989	6,6
5	1990	7,6
6	1991	8,9

7	1992	8,6
8	1993	9,7
9	1994	8,3
10	1995	7,2
11	1996	8,7
12	1997	13,1
13	1998	83,6
14	1999	11,4
15	2000	15,7
16	2001	15,5
17	2002	10,5
18	2003	9,7
19	2004	6,2
20	2005	22,4
21	2006	6,1
22	2007	6,6
23	2008	10,7
24	2009	2,6
25	2010	8
26	2011	3,7
27	2012	3,9
28	2013	10,1
29	2014	8,2
30	2015	3,2

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa inflasi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 1987 inflasi Sumatera Utara naik menjadi 7,3 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,4 persen pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1988-1989 turun menjadi 6,8 persen dan 6,6 persen. Pada tahun 1990 inflasi sebesar 7,6 persen dan kembali naik menjadi 8,9 persen pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1992 turun menjadi 8,6 persen dan pada tahun 1993 kembali mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 9,7 persen.

Kondisi inflasi mengalami penurunan perlahan pada tahun 1994, 1995 dan 1996 walaupun tingkat inflasi masih tinggi yaitu 8,3 persen, 7,2 persen dan 8,7 persen. Sejak krisis moneter melanda perekonomian Indonesia dimulai tahun 1997, inflasi Sumatera Utara menjadi 13,1 persen dan puncaknya pada tahun 1998 meningkat tajam sebesar 83,6 persen.

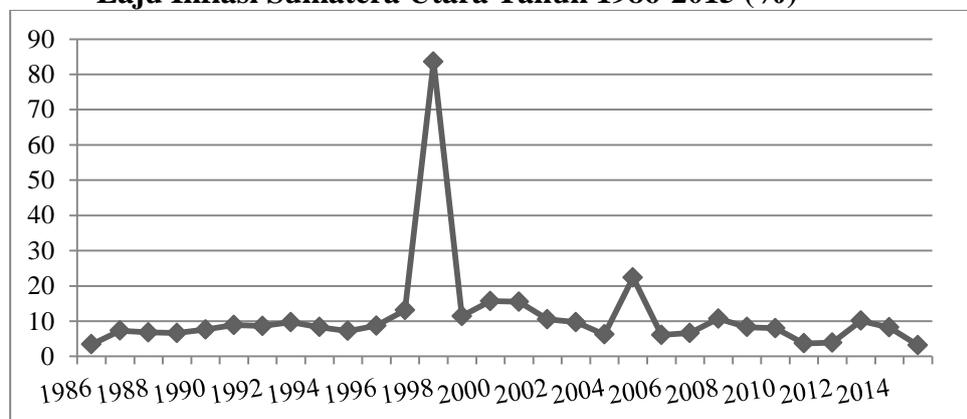
Seiring dengan membaiknya perekonomian, laju inflasi Sumatera Utara cukup rendah. Inflasi tahun 2003 sebesar 9,7 persen lebih rendah dari tahun 2002 sebesar 10,5 persen. Pada tahun 2005, inflasi Sumatera Utara kembali naik mencapai 22,4 persen, angka ini jauh meningkat dari tahun 2004 yang berada pada posisi 6,8 persen. Tingginya laju inflasi yang terjadi pada tahun 2005 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan biaya produksi meningkat.

Laju inflasi selama tahun 2006-2007 menunjukkan perkembangan relatif stabil yaitu berkisar 6 persen. Laju inflasi tahun 2006 sebesar 6,1 persen sedangkan pada tahun 2007 sebesar 6,6 persen dan pada tahun 2008 mencapai 10,7 persen naik sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Inflasi pada tahun 2008 dipengaruhi oleh krisis keuangan global dan juga dipengaruhi oleh harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak. Pada tahun 2009-2010 laju inflasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil dimana pada tahun 2008 inflasi sebesar 2,6 persen dan tahun 2010 sebesar 8 persen.

Pada tahun 2013 laju inflasi mencapai 10,2 persen. Laju inflasi tahun 2013 ini jauh diatas tahun 2011 dan 2012 yang masih 3,7 persen dan 3,9 persen. Inflasi yang tinggi pada tahun 2013 berdampak negatif dimana pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Kondisi ini terjadi karena terjadi penurunan kinerja nilai tukar rupiah yang berkisar Rp. 13.000 per dollar AS dan kemudian akan menambah beban harga kebutuhan impor di tahun tersebut.

Akan tetapi, pada tahun 2015 kondisi inflasi mulai membaik sebesar 3,2 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 8,2 persen. Untuk lebih jelasnya, laju inflasi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini.

Gambar 4.4
Laju Inflasi Sumatera Utara Tahun 1986-2015 (%)



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa laju inflasi di Sumatera Utara selama tahun 1986-2015 menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor yang berbeda. Pada periode 1998 inflasi di Sumatera Utara mencapai titik yang tertinggi sebesar 83,6 persen lebih tinggi dari angka nasional yang

mencapai 77,6 persen. Nilai tertinggi pada tahun 1998 merupakan dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan faktor politik yang tidak aman sehingga mengakibatkan barang dan jasa terus meningkat tajam sampai akhir tahun 1998.

Secara umum, pada tahun 2000-2005 inflasi terus terjadi dengan nilai yang terbilang tinggi yaitu dengan rata-rata mencapai 10 persen. Pada tahun 2005 laju inflasi kembali naik mencapai 22,4 persen. Hal ini merupakan inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia (1997/1998). Penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2005.

C. Hasil Estimasi

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh IPM (X1), tenaga kerja (X2) dan inflasi (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Utara. Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PP				
Method: Least Squares				
Date: 04/12/17 Time: 08:42				
Sample: 1986 2015				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.214091	0.500197	16.42172	0.0000
IPM	0.010991	0.125832	0.087345	0.9311
TK	0.048138	0.053074	0.906992	0.3727
INF	-0.219324	0.026436	-8.296428	0.0000

R-squared	0.754894	Mean dependent var	5.880000
Adjusted R-squared	0.726612	S.D. dependent var	3.668073
S.E. of regression	1.917906	Akaike info criterion	4.263911
Sum squared resid	95.63745	Schwarz criterion	4.450737
Log likelihood	-59.95866	Hannan-Quinn criter.	4.323678
F-statistic	26.69217	Durbin-Watson stat	1.126893
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.6 diatas, maka persamaan analisis regresi linear berganda penelitian ini adalah:

$$\text{GROWTH} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM} + \beta_2 \text{TK} + \beta_3 \text{INF} + e$$

$$\text{GROWTH} = 8,214091 + 0,010991 \text{IPM} + 0,048138 \text{TK} - 0,219324 \text{INF} + e$$

Persamaan hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 8,214091 artinya apabila IPM, tenaga kerja dan inflasi bernilai 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,214091 persen.
- b. Nilai koefisien regresi pada IPM sebesar 0,010991, artinya jika IPM bertambah 1 persen sedangkan tenaga kerja dan inflasi tetap maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,010991 persen. Koefisien bernilai positif artinya adanya hubungan yang positif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. IPM yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Nilai koefisien regresi pertumbuhan tenaga kerja sebesar 0,048138, artinya jika pertumbuhan tenaga kerja bertambah 1 persen sedangkan variabel IPM dan inflasi tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,048138 persen. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

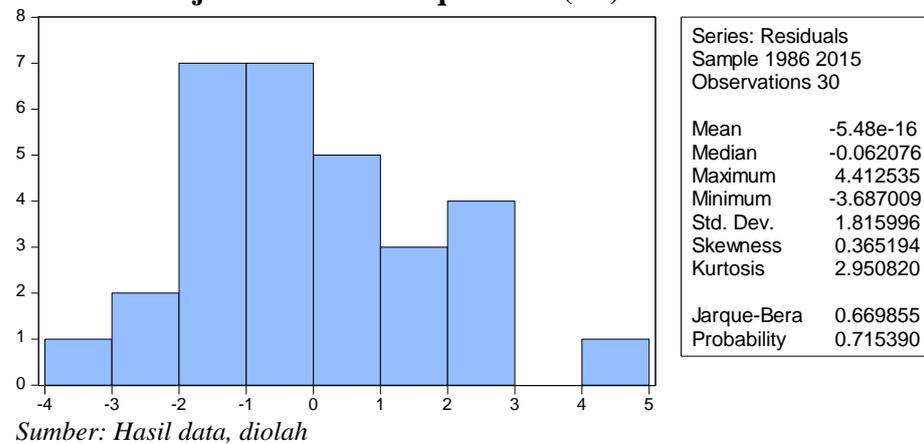
- d. Nilai koefisien regresi pada inflasi sebesar $-0,219324$, artinya jika inflasi bertambah 1 persen sedangkan IPM dan tenaga kerja tetap maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar $0,219324$ persen. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya data tersebut perlu diuji kenormalan distribusinya. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan menggunakan JB-test adalah dengan melihat angka probabilitas dengan menggunakan $\alpha = 5$ persen, apabila nilai probabiliti $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan JB-test dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini.

Gambar 4.5
Uji Normalitas Jarque Bera (JB)



Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai probabiliti Jarque-Bera sebesar 0,715390. Jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5 persen maka $0,715390 > 0,05$. Dengan demikian data penelitian ini yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (Y), IPM (X1), tenaga kerja (X2) dan inflasi (X3) berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 04/12/17 Time: 08:46			
Sample: 1986 2015			
Included observations: 30			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.250197	2.040554	NA
IPM	0.015834	1.213712	1.136483
TK	0.002817	1.117598	1.015641
INF	0.000699	1.833861	1.126100

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui nilai VIF dari IPM sebesar 1,136483, tenaga kerja sebesar 1,015641 dan inflasi sebesar 1,126100. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian data penelitian ini yang terdiri dari IPM, tenaga kerja dan inflasi tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai prob. F-statistik. Apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticity Test* dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji White Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.274939	Prob. F(9,20)	0.9743
Obs*R-squared	3.303014	Prob. Chi-Square(9)	0.9511
Scaled explained SS	2.419925	Prob. Chi-Square(9)	0.9830

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa nilai prob. *Obs*R-Squared* (X2) sebesar 0,9511. Jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5 persen maka 0,9511 lebih besar 0,05. Dengan demikian IPM (X1), tenaga kerja (X2) dan inflasi (X3) tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota rangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, jika prob dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.226141	Prob. F(2,24)	0.1298
Obs*R-squared	4.694472	Prob. Chi-Square(2)	0.0956

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan Tabel 4.9. diatas, nilai prob dari *Obs*R-squared* sebesar 0,0956 lebih besar dari tingkat kepercayaan (0,05). Dengan demikian IPM (X1), tenaga kerja (X2) dan inflasi (X3) tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t-test

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila *p-value* $> \alpha$ maka H_a diterima. Hasil uji t-test dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji t-test

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.214091	0.500197	16.42172	0.0000
IPM	0.010991	0.125832	0.087345	0.9311
TK	0.048138	0.053074	0.906992	0.3727
INF	-0.219324	0.026436	-8.296428	0.0000

Sumber: Hasil data, diolah

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.10 diatas, apabila nilai prob. t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai prob t-statistik lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Berikut merupakan hasil uji t dari masing-masing variabel bebas:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai prob. t-statistik dari IPM sebesar 0,9311 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

2) Tenaga Kerja

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai prob. t-statistik dari tenaga kerja sebesar 0,3727 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

3) Inflasi

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui nilai prob. t-statistik dari inflasi sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika *p-value* $> \alpha$ maka H_a diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

F-statistic	26.69217
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian data diperoleh nilai prob. F-statistik lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000000, maka H_0 ditolak. Artinya, semua variabel independen yang terdiri dari IPM (X1), tenaga kerja (X2) dan inflasi (X3) berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.754894
Adjusted R-squared	0.726612
S.E. of regression	1.917906
Sum squared resid	95.63745
Log likelihood	-59.95866

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, nilai *R-Square* diperoleh sebesar 0,754894. Hal ini menunjukkan bahwa IPM, tenaga kerja dan inflasi mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 75,48 persen. Sedangkan, sisanya sebesar 24,52 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

D. Pembahasan

Penelitian ini berjudul pengaruh IPM, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2015. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Eviews* versi 9, menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,754894. Hal ini menunjukkan bahwa IPM, tenaga kerja dan inflasi mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 75,48 persen sedangkan sisanya sebesar 24,52 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Perhitungan statistik dengan menggunakan *Eviews* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menerangkan variasi pertumbuhan ekonomi. Dari seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian ini, ternyata tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan dalam penelitian ini.

IPM dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi IPM menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien sebesar 0,010991. Hal ini berarti IPM memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana apabila IPM mengalami kenaikan 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,010991 dengan asumsi jika tenaga kerja dan inflasi tetap. Adapun dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5 persen, IPM memiliki nilai prob. t-statistik sebesar 0,9311 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti IPM yang semakin tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Robert M. Solow, dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan”, dimana pertumbuhan output bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan peningkatan teknologi. Sedangkan salah satu alat mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rusmarinda Rakhmawati dengan judul, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja

dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian tersebut IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika IPM meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati (2012) dengan judul, “Pengaruh IPM dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan”. Dalam penelitian ini IPM memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, IPM yang meningkat akan menggerakkan perekonomian daerah karena peningkatan IPM akan mendorong sektor industri untuk memproduksi lebih efisien.

IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berperan positif dalam pembangunan perekonomian. Akan tetapi, IPM tidak memiliki peran paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan IPM, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien tenaga kerja sebesar 0,048138. Hal ini berarti tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana ketika tenaga kerja mengalami kenaikan 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami

kenaikan sebesar 0,048138 persen dengan asumsi IPM dan inflasi tetap. Dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5 persen, variabel tenaga kerja memiliki nilai prob. t-statistik sebesar 0,3727 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Robert M.Solow, dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan”, dimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurnia Maharani dan Sri Isnowati dengan judul, “Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. Tenaga kerja dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, berarti tenaga kerja berperan terhadap nilai output. Dengan naiknya jumlah tenaga kerja, maka output di Jawa Tengah juga akan mengalami kenaikan.

Tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, tenaga kerja memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tenaga kerja tidak memiliki peran paling dominan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien inflasi sebesar $-0,237178$. Hal ini berarti inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana ketika inflasi mengalami kenaikan 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar $0,237178$ persen dengan asumsi IPM dan tenaga kerja. Dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5 persen, variabel inflasi memiliki nilai prob. t-statistik sebesar $0,0000$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hal ini berarti inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Lewis, dalam buku yang berjudul, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”, dimana pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasi harga pada beberapa waktu. Inflasi dengan maksud pembentukan modal adalah sesuatu yang aneh, karena membunuh dirinya sendiri, artinya produksi barang konsumen gagal meningkat secara cepat karena kekakuan struktural.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Izzah dengan judul, “Pengaruh IPM dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau”, dimana inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya,

jika inflasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dan inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh semua masyarakat.

Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, tingkat inflasi tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki peran yang penting untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus akan berakibat buruk terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan akan menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Pemerintah harus mampu menjaga kestabilan harga untuk meningkatkan perekonomian dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi inflasi.

4. Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Kajian Ekonomi Islam.

Menurut Mudrajat Kuncoro peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam Islam. Oleh karena itu, faktor etika, moral dan spiritual merupakan faktor pembentuk aspek kualitatif yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Kualitas pertumbuhan yang baik akan menentukan bentuk perubahan yang akhirnya mempengaruhi kualitas proses pembangunan secara keseluruhan.⁵

⁵Mudarajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24.

Berdasarkan hasil penelitian, IPM memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, IPM yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mudrajat Kuncoro yang menyatakan bahwa kualitas manusia memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan menyuruh orang bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga segala amal ibadah kepada Allah SWT. Bekerja merupakan fardhu kifayah, karena bekerja dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh individu masyarakat akan berdosa apabila tidak ada seorangpun yang mau melakukan kegiatan tersebut.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, tenaga kerja yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Said Sa'ad Marthon yang menyatakan bahwa bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya aktivitas bekerja, maka roda kegiatan ekonomi tidak akan pernah berjalan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki arti besar, karena semua kekayaan alam tidak akan berguna apabila tidak dieksploitasi manusia.

⁶Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid II* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 313.

Menurut para ekonom Islam, inflasi dapat berakibat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan. Orang akan melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, inflasi yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmanto Karim yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah rupiah yang beredar dengan jumlah barang yang tetap, akan menimbulkan inflasi. Bertambahnya jumlah rupiah yang beredar dengan jumlah dolar yang tetap, akan melemahkan nilai tukar rupiah. Keadaan akan bertambah buruk bila jumlah barang dan dolar berkurang, misalnya akibat terhentinya produksi dan tabungan dolar ke luar negeri.⁷

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

⁷Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, secara simultan IPM, tenaga kerja dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, yang hanya menggunakan 3 variabel independen. Sedangkan masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 24,52 persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi R-Squared.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh IPM, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara periode 1986-2015. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada periode 1986-2015 sebesar 0,010991 persen. Artinya, jika IPM naik sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,010991 persen. IPM yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada periode 1986-2015 sebesar 0,048138 persen. Artinya, jika jumlah tenaga kerja naik sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,048138 persen. Pertumbuhan tenaga kerja yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada periode 1986-2015 sebesar -0,219324 persen. Artinya, jika laju inflasi naik sebesar 1 persen maka pertumbuhan

ekonomi akan turun sebesar $-0,219324$ persen. Tingkat inflasi tinggi pertumbuhan ekonomi akan turun.

4. IPM, tenaga kerja dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah hendaknya mengambil kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan IPM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakannya seperti meningkatkan proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Disarankan agar pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. Sebaiknya pemerintah menjaga kestabilan harga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi inflasi yang bertambah cepat tingkatannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan variabel, model dan rentang waktu data yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati, “Pengaruh IPM dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan”, dalam *Jurnal Ekonomi*.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro* Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Faisal Bahri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publising, 2013
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: 2005
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

- Kurnia Maharani dan Sri Isnowati, "Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah", dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 21, No. 01, Maret 2014.
- M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996.
- M.P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Masyhuri Machfudz dan M.Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Mudarajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Sharif Chaundri, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurul Izzah, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau," dalam *Jurnal At-Tijarah Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.
- Rusmarinda Rakhmawati, "Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah," dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2016.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006

_____, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengan Krisis Global*, Jakarta: Zikrul, 2004.

Shochrul Ajija, dkk., *Cara Cerdas Menguasai EViews*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, *Indonesia Ekonomi Outlook 2010*, Jakarta:Grasindo, 2010.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Lenni Haryani Dongoran
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempa/Tanggal Lahir : Kandis, 29 Agustus 1994
4. Anak Ke : 2 (dua) dari 4 Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
8. Telepon/HP : 082368740580
9. E-mail : lenniharyanidongoran@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama
Ayah : Hasan Dongoran
Ibu : Nursoni Harahap
2. Pekerjaan
Ayah : Petani
Ibu : Petani
3. Alamat
Ayah : Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Ibu : Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2001-2007 : SD Negeri 016 Kenantan, Riau
2. Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 5 Padangsidimpuan
3. Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 3 Padangsidimpuan
4. Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan

Lampiran 1

DAFTAR DATA PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM, TENAGA KERJA DAN INFLASI

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)	Tenaga Kerja	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	Inflasi (%)
1986	6,3	58,1	3,9	3.498.606	3,1	3,4
1987	8,7	62,5	7,6	3.950.504	12,9	7,3
1988	11,2	62,6	0,2	4.002.435	1,3	6,8
1989	-9,6	63,8	1,9	4.138.792	3,4	6,6
1990	-6,3	67,9	6,4	3.820.329	-7,7	7,6
1991	7,6	68,1	0,3	4.726.201	23,7	8,9
1992	-7,4	68,7	0,9	4.099.809	-13,3	8,6
1993	-6,4	70,3	2,3	4.193.152	2,3	9,7
1994	6,5	69,2	-1,6	4.318.993	3	8,3
1995	9,3	70,1	1,3	4.493.198	4	7,2
1996	-8,8	70,5	0,6	4.575.651	1,8	8,7
1997	-8,2	67,6	-4,1	4.642.766	1,5	13,1
1998	-10,9	64,6	-4,4	4.530.389	-2,4	83,6
1999	2,6	66,6	3,1	5.037.500	11,2	11,4
2000	4,8	68,3	2,6	4.947.539	-1,8	15,7
2001	-3,7	69,5	1,8	4.977.323	0,6	15,5
2002	4	68,8	-1	4.928.353	-1	10,5
2003	4,5	68,9	0,1	4.835.793	-1,9	9,7
2004	5,7	71,4	3,6	4.756.078	-1,6	6,2
2005	-5,5	72	0,8	5.166.132	8,6	22,4
2006	6,2	72,5	0,7	4.859.647	-5,9	6,1
2007	6,9	72,8	0,4	5.082.797	4,6	6,6
2008	-6,4	73,3	0,7	5.540.263	9	10,7
2009	-5	73,6	0,4	5.765.643	4,1	2,6
2010	6,4	74,2	0,8	6.125.571	6,2	8
2011	6,7	74,6	0,7	5.912.114	-3,5	3,7
2012	-6,2	75,1	0,5	5.751.682	-2,7	3,9
2013	-6,1	75,6	0,7	5.899.560	2,6	10,1
2014	-5,2	68,9	-8,9	5.881.371	-0,3	8,2
2015	-5,1	69,5	0,9	5.962.304	1,4	3,2

Lampiran 2

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Dependent Variable: PP

Method: Least Squares

Date: 04/12/17 Time: 08:42

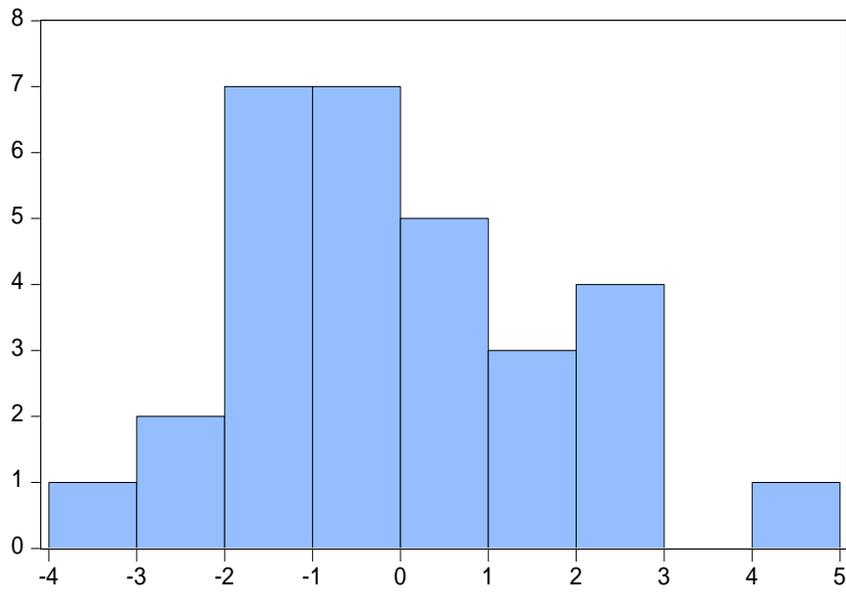
Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.214091	0.500197	16.42172	0.0000
IPM	0.010991	0.125832	0.087345	0.9311
TK	0.048138	0.053074	0.906992	0.3727
INF	-0.219324	0.026436	-8.296428	0.0000
R-squared	0.754894	Mean dependent var		5.880000
Adjusted R-squared	0.726612	S.D. dependent var		3.668073
S.E. of regression	1.917906	Akaike info criterion		4.263911
Sum squared resid	95.63745	Schwarz criterion		4.450737
Log likelihood	-59.95866	Hannan-Quinn criter.		4.323678
F-statistic	26.69217	Durbin-Watson stat		1.126893
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3

HASIL UJI NORMALITAS



Series: Residuals
Sample 1986 2015
Observations 30

Mean -5.48e-16
Median -0.062076
Maximum 4.412535
Minimum -3.687009
Std. Dev. 1.815996
Skewness 0.365194
Kurtosis 2.950820

Jarque-Bera 0.669855
Probability 0.715390

Lampiran 4

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.274939	Prob. F(9,20)	0.9743
Obs*R-squared	3.303014	Prob. Chi-Square(9)	0.9511
Scaled explained SS	2.419925	Prob. Chi-Square(9)	0.9830

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/1217 Time: 08.48

Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.424085	3.851894	1.148548	0.2643
IPM^2	-0.047887	0.058719	-0.815529	0.4244
IPM*TK	0.041203	0.063109	0.652886	0.5213
IPM*INF	-0.040145	0.152350	-0.263504	0.7949
IPM	0.147916	1.342777	0.110156	0.9134
TK^2	-0.008517	0.011416	-0.746047	0.4643
TK*INF	0.010156	0.048630	0.208850	0.8367
TK	-0.007297	0.493508	-0.014786	0.9883
INF^2	-0.001746	0.012438	-0.140349	0.8898
INF	-0.040841	0.555278	-0.073551	0.9421
R-squared	0.110100	Mean dependent var		3.187915
Adjusted R-squared	-0.290354	S.D. dependent var		4.528736
S.E. of regression	5.144362	Akaike info criterion		6.374881
Sum squared resid	529.2892	Schwarz criterion		6.841947
Log likelihood	-85.62322	Hannan-Quinn criter.		6.524300
F-statistic	0.274939	Durbin-Watson stat		1.742908
Prob(F-statistic)	0.974332			

Lampiran 5

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Variance Inflation Factors

Date: 04/12/17 Time: 08.46

Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.250197	2.040554	NA
IPM	0.015834	1.213712	1.136483
TK	0.002817	1.117598	1.015641
INF	0.000699	1.833861	1.126100

Lampiran 6

HASIL UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.226141	Prob. F(2,24)	0.1298
Obs*R-squared	4.694472	Prob. Chi-Square(2)	0.0956

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/12/17 Time: 08.46

Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641147	5.839159	0.109801	0.9135
IPM	-0.010071	0.086873	-0.115931	0.9087
TK	0.016661	0.047129	0.353527	0.7268
INF	-0.000701	0.024604	-0.028508	0.9775
RESID(-1)	0.425976	0.206408	2.063754	0.0500
RESID(-2)	-0.229239	0.214584	-1.068295	0.2960
